



DIY Deklarasikan Pemilu Damai

YOGYA (MERAPI) - Pemda DIY menggelar Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 bertema eMewujudkan Pemilu Damai dan Berbudaya sebagai Sarana Integrasi Bangsa di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Selasa (21/11). Deklarasi tersebut diikuti dan ditandatangani oleh Gubernur DIY, jajaran Forkopimda DIY, Ketua DPRD DIY, Kabinda DIY, Ketua KPU DIY, Ketua Bawaslu DIY, dan 18 pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Deklarasi berisi kesiapan berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya dan bermartabat serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Selain itu, peserta siap berkampanye secara produktif, mengedepankan unsur budaya dan kearifan lokal, siap bekerja sama untuk tidak melakukan politik uang, politisasi SARA, menyebarkan Hoax, provokasi dan ujaran kebencian.

Kemudian siap bekerja sama dengan aparat Polri dan TNI untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, aman dan damai pada pelaksanaan Pemilu 2024 DIY, serta dapat mengendalikan masa pendukung masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat penegak hukum. Juga siap menerima apapun hasil

Pemilu 2024 dengan terbuka dan lapang dada.

"Harapan saya, (isi deklarasi) itu dipatuhi saja. Pemerintah mematuhi, KPU, Bawaslu, peserta pemilu juga mematuhi. Yang penting masyarakat tetap nyaman, tenang, dan berpikir jernih untuk menentukan pilihan. Mereka datang ke TPS tanpa khawatir. Bisa menggunakan hak untuk menentukan pilihan," ujar Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Sesuai dengan batasan kewenangan dan bidang urusan masing-masing, Sri Sultan mengajak semua pihak untuk memastikan Pemilu Damai tidak semata-mata dimaknai sebagai slogan, melainkan sebagai ikhtiar untuk menciptakan atmosfer yang kondusif.

Terkait sanksi bagi pegawai pemerintah yang tidak bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu, Sri Sultan menyampaikan konsekuensi tersebut akan dipikirkan nanti. "Konsekuensi itu nanti akan kita pikirkan. Jangan sekarang. Yang penting semua bisa melaksanakan dan konsisten untuk memegang kesepakatan kita bersama," ujarnya.

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib menyebutkan, hingga saat ini belum ditemukan ASN DIY hingga tataran perangkat desa yang menunjukkan keberpihakan



Kirab budaya yang digelar Pemda DIY dalam menyongsong Pemilu 2024.

atau dukungan politik kepada pasangan capres dan cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Terkait mekanisme pelanggaran, pihaknya melakukan mekanisme pengawasan sebagaimana pelanggaran yang lain. Apabila ditemukan pelanggaran, maka dipastikan ada tindakan tegas dari yang berwenang.

"Jadi ASN kemudian termasuk kepala desa, lurah, perangkat desa itu memang harus netral. Karena mereka adalah pelayan publik harus melayani semuanya tidak boleh berpihak. Tentu kalau ada yang melanggar ya ada konsekuensi terkait dengan pelanggaran itu," terangnya.

Ia menambahkan, Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 yang digelar ini merupakan kegiatan kolaboratif antara Bawaslu DIY, dengan Kesbangpol, dan Polda DIY sebagai upaya untuk mendorong DIY semakin damai selama Pemilu 2024.

"Ini menjadi concern kita semuanya. Kita tidak bisa menggantungkan Pemilu damai hanya pada penyelenggara pemilu, pada pemerintah daerah. Namun semua pihak harus mengambil peran agar kemudian kita bersama-sama mewujudkan Jogja ini damai pada saat Pemilu tahun 2024," ucapnya.

Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyebutkan, berdasarkan data Bawaslu, Yogyakarta termasuk daerah dengan kategori rawan sedang. Sehingga tahun ini diperlukan komitmen dari semua elemen untuk menjaga pemilu tetap damai dan kondusif. Terlebih DIY merupakan daerah dengan keunggulan pariwisata dan pendidikan, jika terjadi keributan dapat mengganggu kepercayaan masyarakat untuk datang.

(C-12)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005